BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan sekolah, termasuk Sekolah Dasar. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terjadi desentralisasi pendidikan, yaitu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu pendekatan pengelolaan pendidikan berdasarkan sekolah, yang dikenala dengan manajemen berbasis sekolah (school based management). Manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sekolah secara mandiri sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengelolaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi banyak ditentukan oleh sekolah.

Dengan wewenang yang besar dalam pengelolaan pendidikan, sekolah pun terdorong untuk menggali berbagai potensi sekolah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika manajemen pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Undangundang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Standar Pengelolaan pendidikan yaitu meliputi standar pengelolaan kompetensi lulusan, standar pengelolaan standar isi dan standar proses, standar pengelolaan kurikulum, standar pengelolaan sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidik dan tenaga standar pengelolaan keuangan dan pembiayaan, kependidikan, standar pengelolaan pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Namun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah standar pengelolaan keuangan dan pembiayaan di sekolah, khususnya sekolah dasar.

1

Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal alokasi 20% anggaran untuk pendidikan harus diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan diantaranya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sampai ke sekolah-sekolah harus melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik, komitmen, transparan dan akuntabel. Untuk pengelolaan di tingkat sekolah, dalam hal ini kepala sekolah sebagai dalam melaksanakan kinerjanya memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam efektivitas memanajemen pembiayaan sekolah tersebut supaya efektivitas penggunaannnya tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengacu pada kutipan di atas bahwasanya suatu organisasi khususnya organisasi pendidikan, faktor pembiayaan memiliki peranan yang strategis dan sangat penting untuk berlangsungnya suatu organisasi tersebut. Apabila unsur pembiayaan ini tidak dijalankan dengan baik maka akan berdampak besar terhadap maju tidaknya suatu organisasi, untuk itu dalam pendidikan diperlukan adanya suatu penganggaran yang direncanakan sedemikian rupa untuk berlangsungnya praktek pendidikan dalam suatu organisasi. Kualitas pendidikan sebagaimana kita harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayan yang dilakukan. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan pembiayaan secara optimal.

Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerja sama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

pelaksanaannya sering ada kendala arau sering ada masalah. Kendala dan masalah dapat muncul pada setiap kegiatan manajemen. Padahal, manajemen pembiayan sekolah merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Oleh karena itu, bagaimana upaya sekolah untuk mengurangi kendala dan memecahkan masalah merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di masing-masing sekolah. Selain itu juga dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi manajemen pembiayaan sekolah perlu didukung juga oleh unsur masyarakat dalam bentuk komite sekolah yang dalam kinerjanya bertugas membantu menajalankan manajemen sekolah bersama kepala sekolah.

Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah membutuhkan biaya tertentu. Untuk itu, manajemen keuangan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar kegiatan yang dilaksanakan dengan lancar. Sehubungan dengan itu kepala sekolah langsung yang akan bertugas mengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan seefisien serta seefektif mungkin.

Menurut Syaiful Sagala (2008:141) jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi, paling tidak sesuai dengan kebutuhan minimal, secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling memahami akan kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian pembiayaan sudah seharusnya dilimpahkan kepada sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana

Deni Komarudin, 2013

untuk mencapai tujuan sekolah. Oleh sebab itu, untuk kelancaran dalam manajemen keuangan sekolah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Baik secara makro atau mikro, pembenahan manajemen pembiayaan pendidikan nasional dalam setiap level mutlak untuk diperlukan untuk memberdayakan seluruh potensi pendidikan sejak dari pusat hingga pada satuansatuan pendidikan. Salah satu solusi yang paling mendasar oleh pemerintah secara nasional mengatasi kesulitan manajemen pembiayaan tersebut adalah dengan otonomi daerah (pelimpahan pengelolaan keuangan).

Sistem otonomi daerah ini akan membuka peluang lebih baik, meskipun di lain pihak juga akan membuka persoalan baru. Namun, secara konseptual pilihan otonomi cenderung lebih aspiratif ketimbang pemerintah yang lebih sentralistik. Berkaitan dengan itu secara operasional dilihat dari sudut yang lebih teknis, maka jenis pembiayaan yang harus dibelanjakan pada dinas pendidikan untuk keperluan pembelajaran pada setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan perlu dipahami dan didefinisikan secara tepat oleh pemerintah kabupaten/kota dan pengambil kebijakan pendidikan terlebih lagi kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan sekolah pada level mikro.

Potensi berikutnya adalah adanya kebijakan penciptaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bernuansa lebih demokratis dalam mendukung pendidikan di daerah dan sekolah, yakni dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan yang berada di tingkat kabupaten/kota (beberapa juga ada di tingkat provinsi) merupakan sebuah lembaga independen yang anggotanya mencerminkan tokoh-tokoh yang peduli pada pendidikan. Dewan pendidikan memiliki peran strategis, misalnya berperan sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan terhadap pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pendidikan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan oleh eksekutif, dan berperan pula sebagai penghubung antara legislatif, eksekutif dan masyarakat pada umumnya.

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

Sementara itu, komite sekolah (kadang disebut dengan nama lain seperti dewan sekolah atau majlis madrasah) merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan orang tua siswa, guru, dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, termasuk dari kalangan dunia usaha. Lembaga ini berperan sebagai mitra kerja pihak sekolah dalam memajukan pelayanan pendidikan di sekolah secara lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dengan sistem ini diasumsikan semakin terjamin akuntabilitas manajemen maupun penggunaannya dan dapat mengoptimalkan kinerja kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan pada tingkat sekolah dibantu perwakilan dari masyarakat dalam bentuk komite sekolah dalam memberikan pelayanan ke satuan pendidikan dalam hal efektivitas manajemen pembiayaan sekolah. Salah satu kendala pada umumnya adalah biaya. Pendidikan akan dapat tercapai apabila tersedia dana yang mencukupi. Untuk menyediakan berbagai sumber dan fasilitas yang dibutuhkan,dan menuntut pengelolaannya, secara efektif, efisien dan akuntabel. Dedi Supriadi (2003:3) mengungkapkan bahwa:

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah), dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan,baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga daspat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

Agar setiap biaya pendidikan yang dialokasikan dapat menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan sesuai tujuan, maka pengelolaan keuangan dituntut tanggung jawab secara rasional dan moral. Terutama pengalokasian/penggunaan uang harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan semua pihak. Setiap dana atau uang yang dimiliki sekolah itu harus bertanggungjawab dari

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

mana sumbernya dan untuk apa pendistribuisianya. Kepala sekolah sebagai manajer bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan pembiayaan tersebut berdayaguna bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh terarah pada pencapaian mutu pendidikan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyono (2010:82) dalam buku konsep pembiayaan pendidikan mengemukakan bahwa:

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana tetapi juga menyangkut penggunaan dana itu secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu dengan pengelolaan biaya secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevansi antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat.

Dari kutipan di atas mempertegas kepada pengelola pendidikan khususnya bagi kepala sekolah dan komite sekolah secara bersama-sama mengelola pembiayaan sekolah secara efektif dan efisien, dengan demikian akan terwujudnya pencapaian tujuan-tujuan pendidikan secara keseluruhan, mengingat bawa faktor pembiayaan sekolah merupakan salah satu unsur penting dalam terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Manajemen pembiayaan sekolah yang efektif perlu memikirkan metode penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan upaya apa untuk meningkatkan kinerja sekolah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan kepala sekolah dan dibantu oleh komite sekolah yang dikenal dengan istilah administrasi keuangan, menurut Nanang Fatah (2000:112), kegiatan administrasi keuangan sekolah adalah:

Penentuan kebijakan keuangan dalam pengadaan dan penggunaannya agar terwujud kegiatan yang tepat bagi pencapaian tujuan, aspek-aspeknya yang utama menyangkut perencanaan, pengadaan, dan penggunaan uang termasuk di dalamnya kontrol terhadap ketepatan penggunaan dan administrasi pembukuannya.

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

Berdasarkan pendapat tersebut dalam penggunaan keuangan sekolah terdapat aspek yang paling penting yaitu bagaimana penggunaan uang tersebut secara tepat dan pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan. Pemanfaatan biaya yang tersedia baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang telah dialokasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tata usaha sekolah, mpemeliharaan sekolah, kesejahteraan pegawai, pembinaan guru, dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, diperlukan pertanggung jawabannya mengingat uang merupakan alat yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Uang mudah merangsang terjadinya penyalahgunaan wewenang, berakibat adanya penyimpangan dalam penyaluran atau sasaran yang harus dicapai.

Ketersediaan dana serta pengelolaannya yang baik perlu dilakukan pada jenjang pendidikan apapun termasuk Sekolah Dasar sebagai salah satu jenis pendidikan dasar tidak terlepas dari keharusan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar juga menyangkut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Diharapkan dengan tersedianya dana serta pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan sekolah yaitu kepala sekolah dibantu dengan komite sekolah dalam melakukan kinerja manajemen keuangan sekolah mampu mendorong tercapainya kualitas/ mutu pendidikan yang lebih baik.

Faktor pembiayaan turut menentukan mutu pendidikan. Sebagaimana pendapat Nanang Fatah (2009:7) bahwa:

Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan,dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu,faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar.

Deni Komarudin, 2013

Dari kutipan di atas biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, artinya bahwa kepemimpinan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah berwenang untuk membuat kebijakan dan manajemen pembiayaan sekolah secara efektif melalui kinerja kepala sekolah haruslah menyangkut seluruh aspek komponen sekolah diantaranya adalah keuangan. Mengingat itu kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya dalam hal manajemen pembiayaan sekolah tidak terlepas dari dukungan pihak lain diantaranya adalah komite sekolah yang bertugas memonitor kegiatan manajemen pengelolaan pembiayaan sekolah.

Kegiatan manajemen merupakan suatu upaya dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif melalui proses perencanaan, penggorganisasian, memimpin dan pengawasan segala sumber daya yang ada dalam organisasi baik yang berupa manusia maupun non manusia artinya totalitas dalam organisasi yang terangkum dalam dimenensi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang melibatkan personalia sebagai sumberdaya manusia dan material yang mencakup aset dan keuangan maupun pengelolaan waktu, kesempatan dan peluang yang bermuara pada efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai harapan dan keinginan. Dalam melaksanakan aktivitas manajemen tentu memiliki dasar pijakan yang menjadi acuan yang disebut prinsip. Prinsip manajemen sebagai dasar dan landasan dalam praktik manajemen,hanya bersifat garis besar dalam arti cakupannya dapat diteapkan dalam seluruh bentuk manajemen.

Menurut Andyarto Sujana (2009) dalam jurnal sistem manajemen pembiayaan pendidikan dikatakan bahwa "Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan."

Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan,

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang memangku kepentingan tersebut adalah kepemimpinan pendidikan yaitu kepala sekolah.

Kepala sekolah sebagai individu dengan mekanisme yang berlaku dalam institusi pendidikan, diangkat sehingga menduduki jabatan struktural teratas dalam suatu sekolah. Dalam koridor profesionalisme kepala sekolah harus memiliki kelebihan dibanding yang lain. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dapat berperan sebagai manajer, supervisor pimpinan, pendidik staf maupun sebagai pejabat formal. Dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan sekolah seorang manajer dalam hal ini kepala sekolah pada hakekatnya sebagai perencana organisator, pimpinan dan pengendali, keberadaannya sebagai manajer dalam organisasi tidak terlepas dari dukungan dan pengawasan dari komite sekolah dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah.

Salah satu dukungan dan pengawasan yang dilakukan komite sekolah bekerja sama dengan kepala sekolah adalah mengenai manajemen pembiayaan sekolah, sehingga antara komite sekolah dengan kepala sekolah selaras dalam melaksanakan kinerjanya masing-masing. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian peran komite sekolah adalah ketetapan tujuan yang ingin dicapai atas tingkah laku yang diharapkan terhadap komite sekolah sesuai dengan kedudukannya dalam membantu terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah meliputi: (1) sebagai pemberi pertimbangan, (2) pemberi dukungan, (3) pengawasan, dan (4) mediasi.

Kaitan antara kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah dalam manajemen pembiayaan sekolah, sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

lainnya. Antara kepala sekolah dengan komite sekolah secara bersama-sama bertanggung jawab dalam hal manajemen pembiayaan sekolah, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan pengelolaan keuangan sekolah bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan pembiayaan sekolah, sedangkan komite bertugas sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan peran mediasi terhadap pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah. Salah satu bentuk keterlibatan komite sekolah dalam manajemen pembiayaan sekolah adalah ikut terlibat aktif bersama kepala sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang ditetapkan pada awal tahun ajaran. Dengan adanya keselarasan antara kepala sekolah dan komite sekolah dalam efektivitas manajemen pembiayaan sekolah maka dapat terwujud yang berdampak pada kualitas/mutu pendidikan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dedy Achmad Kurniady (2011) dalam jurnal pengelolaan pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa:

Pengelolaan pembiayaan pada tingkat sekolah dasar, dalam mengalokasikan atau mendistribusikan biayanya selama ini cenderung masih mengacu pada pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya, belum berdasarkan pada program atau kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Dari kutipan di atas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa dalam melakukan pengalokasian atau pendistribusian pembiayaan sekolah masih belum efektif, yaitu mengacu pada pengelolaan sebelumnya bukan berdasarkan pada prioritas program pembiayaan yang seharusnya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas manajemen pembiayaan sekolah dasar yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah sebagai pengelola pembiayaan sekolah secara bekerjasama menjalankan kinerjanya masing-masing.

Deni Komarudin, 2013

Laporan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat setelah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada triwulan Januari-Maret 2013 menunjukan bahwa dari 38 SD Negeri se-Kecamatan Batuajajar Kabupaten Bandung Barat menunjukan bahwa sekitar 20% dari sekolah yang ada masih belum optimal dalam manajemen pembiayaan sekolah salah satunya adalah pembiayaan sekolah yang tertuang dalam bentuk RKAS dan RAPBS disesuaikan dengan laporan keuangan pertriwulan yang dilaporkan kepada UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Batujajar.

Data tersebut menggambarkan bahwa dalam manajemen pembiayaan sekolah se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat masih perlu dibenahi dan ditelusuri lebih dalam lagi, khususnya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan terpenting dalam manajemen pembiayaan sekolah perlu meningkatkan kinerjanya dan memiliki kemampuan mengelola keuangan sekolah dengan sebaikbaiknya dan seefisien serta seefektif mungkin, selain itu juga perlu kerjasama dengan komite sekolah dalam penyusunan dan penentuan pengalokasian keuangan sekolah karena komite sekolah merupakan bentuk perwakilan unsur masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.

Untuk itu penulis melakukan penelitian mengenai "EFEKTIVITAS MANAJEMEN PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR (Studi Deskriptif tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)"

B. Identifikasi Masalah

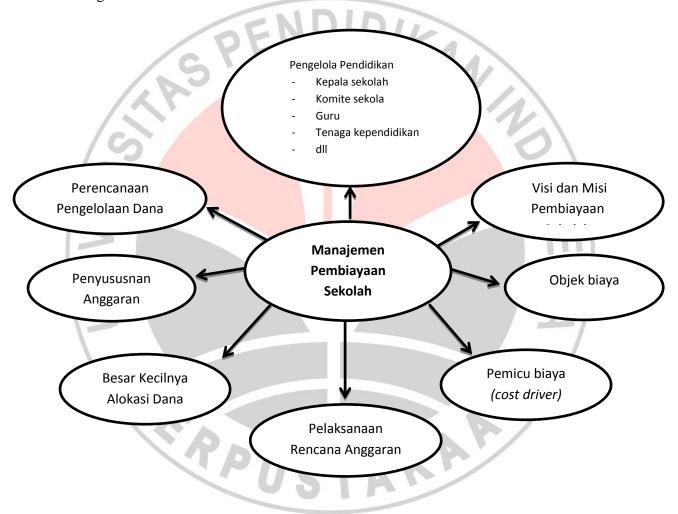
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen pembiayaan sekolah, menurut Mulyono (2010:84) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pembiayaan sekolah terdiri dari objek

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

biaya, besar kecilnya alokasi dana, pemicu biaya (cost driver), pengelola pendidikan, pelaksanaan rencana anggaran, anggaran (budget), penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan visi misi pembiayaan sekolah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sekolah dapat dilihat di bagan di bawah ini:



Gambar 1.1 Faktor yang mempengaruhi pembiayaan sekolah (Mulyono, 2010:84)

Deni Komarudin, 2013

Dari banyak faktor-faktor diatas, penulis membatasi faktor yang akan diteliti sebagai pembatasan masalah yang akan diidenfitikasi yaitu faktor pengelola pendidikan diantaranya kepala sekolah dan komite sekolah. Adapun faktor kepala sekolah dalam hal pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan terhadap proses mengelola keuangan sekolah sehingga manajemen pembiayaan sekolah dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah melalui kinerjanya bertugas untuk mengelolanya dengan akuntabel dan transparan. Menurut Sri Minarti (2012:208) kepala sekolah dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya dan efisien serta seefektif mungkin. Sedangkan komite sekolah merupakan unsur perwakilan masyarakat yang melalui berbagai peran kinerjanya bertugas sebagai badan pengawas, pemberi pertimbangan, pengontrol dan badan mediator terhadap jalannya proses pendidikan di sekolah yang salah satu kinerjanya adalah ikut berpartisipasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah melalui penyusunan RKAS/RAPBS sekolah. Dengan bekerjasamanya kedua faktor tersebut yaitu kepala sekolah dan komite sekolah akan menciptakan manajemen pembiayaan sekolah yang efektif dan efisien.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah gambaran kinerja kepala sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 2. Bagaimanakah gambaran kinerja komite sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 3. Bagaimanakah gambaran efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

Deni Komarudin, 2013

- 4. Seberapa besar pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 5. Seberapa besar pengaruh kinerja komite sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 6. Seberapa besar pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran yang objektif dan efektif tentang pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan secara khusus dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengungkap informasi dan menganalisis secara lebih jelas mengenai pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Untuk memperoleh informasi atau mengetahui gambaran tentang kinerja kepala sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Untuk memperoleh informasi atau mengetahui gambaran tentang kinerja komite sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

Deni Komarudin, 2013

- 3. Untuk memperoleh informasi atau mengetahui gambaran tentang efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- 4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar.
- 5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja komite sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar.
- 6. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah secara bersama-sama terhadap manajemen terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah pada SD Negeri se-Kecamatan Batujajar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan secara akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas manajemen pembiayaan sekolah.
- b. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Deni Komarudin, 2013

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Dan Kinerja Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah sebagai evaluasi atas kepemimpinannya,apakah kinerja yang selama ini dilakukan melalui proses yang demokrasi atau hanya berdasarkan kehendak pribadi.
- b. Komite sekolah agar lebih memahami kinerjanya dalam mendukung sekolah serta mampu meningkatkannya sebagai mitra sekolah.
- c. Para guru agar lebih berperan membantu kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik. komite sekolah dapat membantu terlaksananya efektivitas manajemen pembiayaan sekolah secara efektif dan transparan.

F. Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini, disusun struktur tesis dengan skema, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini akan diuraikan tentang garis-garis besar keseluruhan permasalahan yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah,tujuan penelitian,metode penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Pada bab ini dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasan masalah yang dikaji. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik, serta tujuan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, proses pengembangan instrument, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini dibahas mengenai pengolahan data atau analisis data,untuk menghasilkan temuan yang berkaitan

Deni Komarudin, 2013

dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan peneelitian, pembahasan dan analisa hasil temuan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, Pada bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian



Deni Komarudin, 2013